

**LAPORAN SINGKAT**  
**RAPAT PEMBUATAN MAKALAH DAN PENGAMBILAN NOMOR**  
**UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON HAKIM AGUNG DAN**  
**CALON HAKIM ADHOC PADA MAHKAMAH AGUNG**

---

Tahun Sidang : 2019-2020  
Masa Persidangan : II  
Rapat ke : IV  
Sifat : Terbuka  
Jenis Rapat : Uji Kelayakan dan Kepatutan  
Acara Rapat : Pembuatan Makalah dan Pengambilan Nomor Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Agung Dan Calon Hakim Adhoc Pada Mahkamah Agung  
Hari/tanggal : Senin, 20 Januari 2020.  
Waktu : Pukul 10.10 – 11.35 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI.  
Ketua Rapat : Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum./ Wakil Ketua Komisi III DPR RI.  
Sekretaris : Novianti, S.E. / Kepala Bagian Sekretariat Komisi III DPR RI  
Hadir : 1. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam,  
2. 2 (dua) orang Pimpinan Komisi III DPR RI  
3. 14 (empat belas) Anggota dari 53 (lima puluh tiga) Anggota Komisi III DPR RI, dari 9 (sembilan) fraksi

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Pembuatan Makalah dan pengambilan nomor Calon Hakim Agung dan Calon hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung dibuka pukul 10.10 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum., dengan agenda rapat membahas mengenai pembuatan makalah dan pengambilan nomor urut peserta uji kelayakan Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung.

## **II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN**

- A. Beberapa hal yang disampaikan oleh Pimpinan Rapat adalah sebagai berikut:
1. Calon Hakim Agung dan Calon Hakim pada Mahkamah Agung membuat Makalah, dengan ketentuan dibuat paling banyak 5 (lima) halaman, menggunakan kertas ukuran A4, diketik satu setengah spasi dengan memilih salah satu judul dalam amplop tertutup yang disediakan oleh Komisi III DPR RI. Adapun jangka waktu pembuatan makalah dilaksanakan **paling lama 1 (satu) jam**.

2. Pembuatan makalah yang dilakukan oleh Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung dibuat dengan cara diketik dengan komputer/laptop atau dapat ditulis dengan tangan. Pembuatan makalah yang ditulis dengan tangan, harus diketik ulang dengan komputer dengan tetap melampirkan hasil pembuatan makalah yang ditulis dengan tangan.
3. Jadwal pelaksanaan Uji Kelayakan didasarkan pada daftar nomor urut peserta yang diperoleh oleh masing-masing Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung yang tersedia pada amplop tertutup.
4. Alokasi waktu Uji Kelayakan (*fit and proper test*) masing-masing Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung paling lama **90 (sembilan puluh) menit** termasuk **10 (sepuluh) menit** yang digunakan untuk menyampaikan pokok-pokok makalah.
5. Pelaksanaan Uji Kelayakan (*fit and proper test*) mulai dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 22 Januari 2020 (jadwal nomor urut Uji Kelayakan disusun setelah Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung memperoleh nomor urut peserta seleksi).

B. Hasil pengambilan nomor urut peserta adalah sebagai berikut :

1. Ansori, S.H., M.H., mendapatkan nomor urut 1 dengan judul makalah “Menentukan Unsur Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan”.
2. Sugiyanto, S.H.,M.H., mendapatkan nomor urut 2 dengan judul makalah “Eksistensi dan Kedudukan Lembaga Bipartit, Mediasi dan Konsolidasi dalam Sistem Pengadilan Hubungan Industrial terhadap Prinsip Kepastian Hukum”.
3. Dr. Willy Farianto, S.H.,M.Hum., mendapatkan nomor urut 3 dengan judul makalah “Implementasi Asas *Equality Before The Law* Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)”.
4. Soesilo, S.H., M.H., mendapatkan nomor urut 4 dengan judul makalah “Kajian Mengenai Pengalihan Pidana Ringan untuk dapat diselesaikan Berdasarkan Hukum Adat Setempat sesuai dengan Kearifan Lokal guna Mengurangi Beban Peradilan Umum, Khususnya Mahkamah Agung”.
5. Dr. Agus Yunianto, S.H., M.H., mendapatkan nomor urut 5 dengan judul makalah “Penerapan Terhadap Ajaran “Turut Serta Melakukan (*Medeplegen*) Dalam Praktik Peradilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”.
6. Drs. H. Busra, S.H., M.H., mendapatkan nomor urut 6 dengan judul makalah “Peran Khasanah Fiqih Islam dalam Memajukan dan Memperkaya Hukum Nasional”.
7. Dr. Sartono, S.H., M.H., M.Si., mendapatkan nomor urut 7 dengan judul makalah “Peran Mahkamah Agung dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada dan Pengujian Pendapat DPRD bahwa Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota Telah Melanggar Sumpah/Janji dan/atau Tidak Melaksanakan Kewajiban”.

8. Brigjen TNI Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., mendapatkan nomor urut 8 dengan judul makalah “Yurisdiksi dan Kedudukan Peradilan Militer dalam Prespektif Organisasi Kekuasaan Kehakiman”.
9. Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., mendapatkan nomor urut 9 dengan judul makalah “Permasalahan Hukum Permohonan Eksekusi Sengketa Perdata yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*), Khususnya Terhadap Putusan Lembaga Kuasi Yudisial”.
10. Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., mendapatkan nomor urut 10 dengan judul makalah “Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) dalam Gugatan Perdata Perkara Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Korporasi setelah Keluarnya KMA No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup”.

C. Pembuatan makalah dimulai pukul 10.30 -11.30 WIB.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 11.35 WIB

PIMPINAN KOMISI III DPR RI  
WAKIL KETUA,

Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.  
A-313

